

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Ditinjau dari Aspek Transparansi dan Akuntabilitas (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil)

Nurneni¹, Elwardi Hasibuan², Porkas Sojuangon Lubis³

^{1,2,3} Akuntansi, Universitas Al Washliyah Medan

e-mail: nurneni890@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja pengelola keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil ditinjau dari aspek transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil. Populasi sekaligus sampel dalam penelitian ini berjumlah 45 orang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui kuisioner, wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi. Pengolahan data serta analisis statistik mempergunakan program SPSS versi 20.0 dengan tingkat signifikansi 0,05. Hasil uji validitas dan reliabilitas, seluruh instrumen penelitian adalah sahih, valid dan reliabel. Teknik analisis data digunakan adalah uji koefisien determinasi (R^2) melalui uji regresi linier berganda. Hasil uji statistik dalam penelitian ini menyatakan bahwa variabel variabel transparansi dan akuntabilitas mampu mempengaruhi kinerja keuangan sebesar 7,6% sedangkan sisanya 92,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dari tabel *Coefficients^a* diperoleh persamaan regresi linier berganda $Y = 41,272 + 0,003 + 0,298$. Konstanta (a) = 41,272 bertanda positif transparansi dan akuntabilitas 0,003 dan 0,298 bertanda positif, artinya adalah transparansi dan akuntabilitas secara parsial mempunyai hubungan yang positif terhadap kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil. Sedangkan secara simultan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Kata kunci: *Transparansi, Akuntabilitas, Kinerja Keuangan*

Abstract

This research was conducted at the Aceh Singkil Regency Regional Financial Management Board which aims to find out how the performance of the Aceh Singkil Regency Government financial manager is viewed from the aspect of transparency and accountability. This study uses a quantitative design. The population in this study were employees of the Regional Financial Management Board of Aceh Singkil Regency. The population as well as the sample in this study amounted to 45 people. The data used in this study are primary data obtained through questionnaires, interviews, field observations and documentation. Data processing and statistical analysis used SPSS version 20.0 with a significance level of 0.05. The results of the validity and reliability tests, all research instruments are valid, valid and reliable. The data analysis technique used is the coefficient of determination test (R^2) through multiple linear regression tests. The statistical test results in this study stated that the variables of transparency and accountability were able to influence financial performance by 7.6% while the remaining 92.4% were influenced by other variables not examined in this study. From the *Coefficients^a* table, the multiple linear regression equation $Y = 41.272 + 0.003 + 0.298$ is obtained. Constant (a) = 41.272 has a positive sign of transparency and accountability 0.003 and 0.298 is positive, meaning that transparency and accountability partially have a positive relationship to the financial performance of the Regional Financial Management Board of Aceh Singkil Regency. While simultaneously there is no significant effect between

transparency and accountability on the financial performance of the Regional Financial Management Board of Aceh Singkil Regency.

Keywords: *Transparency, Accountability, Financial Performance*

PENDAHULUAN

Agenda reformasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia, satu diantaranya adalah reformasi manajemen keuangan dalam mewujudkan *good governance* pengelolaan keuangan negara maupun keuangan daerah. Adanya tuntutan reformasi tersebut, pemerintah telah mengeluarkan dua undang-undang yang sangat penting artinya dalam sistem hubungan keuangan pemerintahan antara pusat dan pemerintahan daerah. Kedua undang-undang tersebut adalah UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pemerintahan pusat dan daerah, telah diubah menjadi UU No. 32 dan 33 tahun 2004. Pelaksanaan otonomi dan desentralisasi dalam usaha pembangunan perlu dilakukan secara terencana dan sistematis sehingga pemberian otonomi dan desentralisasi di bidang keuangan perlu ditempuh agar usaha pembangunan dapat dilakukan secara efisien dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Era baru dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan pemerintahan pusat dan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah, karena suatu daerah dapat menjadi daerah yang kuat serta mampu berkembang atau sebaliknya, tergantung kemampuan daerah tersebut dalam mengelola keuangannya. Instrumen yang dapat digunakan untuk melihat seberapa jauh kemampuan daerah di dalam menjalankan kegiatan pembangunan dan kegiatan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana pembangunan daerah yang dituangkan dalam bentuk angka, publik merupakan pihak yang berkepentingan dalam proses penyusunan anggaran daerah. Karena pada hakekatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan perwujudan amanat rakyat kepada pihak eksekutif untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum bagi masyarakat dalam batas otonomi daerah yang dimilikinya.

Untuk melihat seberapa baik dan benarnya suatu pengelolaan keuangan, perlu dilakukan pengukuran Kinerja Keuangan. Pengukuran Kinerja Keuangan memiliki dua tujuan. Pertama pengukuran Kinerja Keuangan digunakan untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan. Kedua untuk mengetahui kemampuan dalam mendayagunakan semua aset (Jumingan, 2006:239).

Pengukuran Kinerja Keuangan penting dilakukan untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan dalam mempertontonkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi memperlihatkan kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut dibelanjakan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Efisien berarti penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan output yang maksimal, efektif berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan untuk kepentingan publik dan ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada tingkat harga yang paling murah (Mardiasmo, 2004:182).

Selama ini penyusunan APBD masih dilakukan berdasarkan pertimbangan *incremental budget* (sistem anggaran pendapatan dan belanja yang memungkinkan revisi selama tahun berjalan) karenanya seringkali mengabaikan Kinerja Keuangan dalam APBD. Anggaran pendapatan seringkali dibuat lebih rendah dari potensi pendapatan yang mungkin diperoleh agar pada tahap pelaporan realisasi anggaran diharapkan realisasi pendapatan lebih besar jumlahnya dari anggaran pendapatan yang telah dibuat, sedangkan belanja memiliki sifat yang relatif mudah dilakukan dan rentan akan terjadinya kebocoran atau inefisiensi sehingga kemungkinan anggaran belanja dibuat lebih besar dari potensi realisasi belanja yang sebenarnya.

Penggunaan analisis Kinerja Keuangan sebagai alat ukur kinerja keuangan secara luas sudah diterapkan diberbagai perusahaan yang bersifat komersial, sementara itu dalam lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas sekali. Maka dari itulah diperlukan suatu perubahan yang mengacu pada penggunaan analisis Kinerja Keuangan dalam pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah. Sebagaimana tujuan pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Menurut Mardiasmo (2016:121), Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu: 1) Memperbaiki Kinerja Pemerintah Daerah. 2) Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. 3) Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Kabupaten Aceh Singkil merupakan salah satu pemerintahan daerah di Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022 memperoleh opini WTP (wajar tanpa pengecualian) atas Laporan keuangan pemerintah daerah 7 tahun berturut-turu sebagaimana disampaikan oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Aceh, Masmudi, SE, M.Si, Ak, CSFA di Aula Kantor BPK-RI Banda Aceh, akan tetapi tingkat Kemiskinan di Aceh Singkil masih paling tinggi di Aceh sejak tahun 2015. Begitu juga dengan PDRB (Pendapatan Domestik Regional Brutto) per kapita dan tingkat pengangguran yang masih berada dibawah kinerja rata-rata kabupaten/kota di Aceh (<https://infopublik.id/Senin,17/04/2023>). Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan maka ditentukan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimanakah kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil ditinjau dari aspek transparansi dan akuntabilitas pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil?”.

METODE

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian yang akan di teliti. Populasi adalah seluruh elemen-elemen atau individu yang merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian (Hadi, 2006:45). Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Aparatur sipil Negara (ASN) yang bertugas di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil, baik itu berstatus PNS maupun non PNS sebanyak 45 orang. Sampel adalah bagian atau wakil populasi yang memiliki karakteristik Sama dengan populasinya, diambil sebagai sumber data penelitian (Hadi.2006:46). Data penelitian ini telah diketahui, sehingga data sampel yang akan Digunakan sama dengan populasinya yaitu 45 orang yang bekerja di satuan kerja perangkat daerah (SKPD), tepatnya pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil. Dengan demikian maka peneliti menetapkan sampel dalam penelitian ini adalah sampel jenuh.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan metode survey. Penelitian kuantitatif adalah data yang berupa angka atau besaran tertentu yang sifatnya pasti (Hadi, 2006:42). Data yang dikumpulkan oleh penulis sebagai bahan penulisan ini meliputi data primer dan data sekunder. Pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini secara langsung melalui metode studi lapangan dan penyebaran kuesioner.

Sugiyono (2017:142) menyatakan kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Suatu cara pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden.dengan menggunakan skala likert sebagai pengukurannya.

Tabel 1. Skala Likert

No	Alternatif Jawaban	Skor
----	--------------------	------

1.	Sangat Setuju	5
2.	Setuju	4
3.	Kurang Setuju	3
4.	Tidak Setuju	2
5.	Sangat Tidak Setuju	1

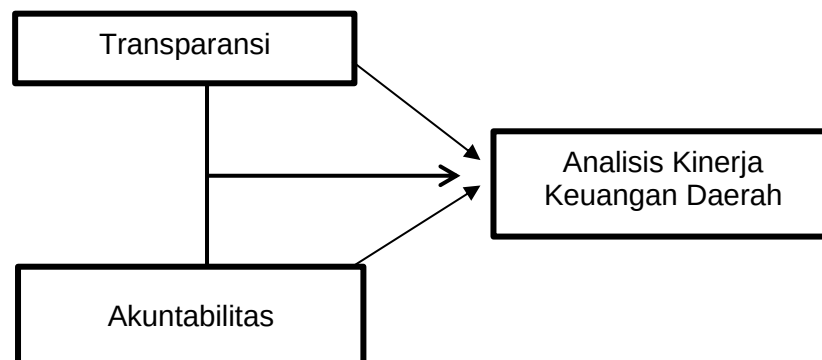
Sebelum mengolah data penelitian lebih lanjut, terlebih dahulu dilakukan uji terhadap kualitas data yang dihasilkan dari jawaban responden berdasarkan responden yang ada. Uji kualitas data dilakukan untuk memastikan kuesioner yang digunakan benar-benar valid dan realibel dalam mengukur variabel.

Uji validitas dilakukan untuk menentukan tingkat akurasi data. Uji validitas digunakan untuk menguji instrumen penelitian agar instrumen tersebut dapat memberikan hasil yang sesuai dengan tujuannya. Uji validitas bertujuan untuk mengukur apakah pertanyaannya dalam kuesioner benar-benar mengukur apa yang hendak diukur (Ghozali, 2011:52). Sunyoto (2013:85) menyatakan uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner.

Metode yang digunakan menggunakan koefisien korelasi pearson correlation. Kriteria yang ditetapkan adalah r_{hitung} (koefisien korelasi) lebih besar dari r_{tabel} (nilai kritis) pada taraf signifikan 0,05. Jika koefisien korelasinya lebih besar dari nilai kritisnya maka instrumen pengukuran dapat dikatakan valid.

Uji reliabilitas instrumen penelitian dilaksanakan dengan melihat Konsistensi koefisien *Cronbach Alpha* untuk semua variabel. Reliabilitas adalah Indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukuran dapat dipercaya Atau dapat diandalkan (Ghozali, 2011:47). Kriteria yang ditetapkan dalam mengetahui data adalah nilai koefisien Reliabilitas alpha yang lebih besar dari 0,60. Jika nilai koefisien reliabilitas Alphanya lebih besar dari 0,60 maka instrumen pengukur variabel dapat dikatakan Reliabel.

Untuk memperjelas konsep dan arah peneliti, maka kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Hipotesis adalah sebuah kesimpulan sementara yang masih akan Dibuktikan lagi kebenarannya. Hipotesis disebut sebagai kesimpulan karena Hipotesis merupakan kesimpulan dari sebelum pelaksanaan penelitian (Hadi, 2006:89). Dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. H1: Transparansi berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah
2. H2: Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah
3. H3:Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah

Uji asumsi klasik dilakukan untuk menguji kelayakan data yang dikumpulkan. Adapun uji asumsi klasik yang dimaksud terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas. Sedangkan, teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS Versi 20.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian validitas digunakan untuk mengukur pernyataan-pernyataan yang ada dalam kuesioner. Suatu pernyataan dikatakan valid jika pernyataan tersebut mampu mengungkapkan apa saja yang hendak diukurnya. Penyebaran kuesioner dilakukan pada 45 orang responden dengan jumlah pertanyaan sebanyak 24 item pertanyaan, dimana seluruh item pertanyaan dikategorikan valid dengan syarat r hitung atau nilai pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* lebih besar daripada r table product moment r tabel ditetapkan sebesar 0,248 untuk pengambilan keputusan:

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Variabel X1

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	28.0222	23.931	.327	.771
VAR00002	27.6222	24.740	.485	.744
VAR00003	27.7333	23.791	.430	.750
VAR00004	27.8444	22.771	.502	.737
VAR00005	27.7333	24.018	.447	.747
VAR00006	27.8889	22.465	.509	.736
VAR00007	27.9556	21.907	.525	.733
VAR00008	27.9556	23.134	.566	.728

Sumber: Hasil data olahan SPSS Versi 20

Corrected Item - Total Correlation merupakan korelasi antara skor item dengan skor total item yang dapat digunakan untuk menguji validitas instrument. Nilai pada kolom *corrected item total correlation* merupakan r_{hitung} yang akan dibandingkan dengan r_{tabel} untuk mengetahui validitas pada setiap butir pertanyaan. Dengan membandingkan r_{hitung} dan r_{tabel} sebesar 0,248 maka kesimpulan yang diperoleh adalah semua pernyataan valid karena semua item r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} .

Demikian juga dengan variabel X2 dan Y dimana seluruh skor item pertanyaan yang diajukan, seluruhnya berada di atas r_{tabel} . Dengan skor total item lebih besar dari r_{tabel} sebesar 0,248, maka seluruh butir pertanyaan adalah valid. Untuk jelasnya dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel X2

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	24.2889	12.846	.619	.868
VAR00002	24.4000	13.245	.585	.872
VAR00003	24.2000	11.664	.786	.846
VAR00004	24.2444	11.871	.730	.854
VAR00005	24.0667	11.745	.709	.857
VAR00006	24.4444	12.480	.583	.873
VAR00007	24.4889	12.028	.651	.865

Sumber: Hasil data olahan SPSS Versi 20

**Tabel 4. Hasil Uji Validitas Variabel Y
Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	32.6000	16.155	.737	.813
VAR00002	32.6444	18.553	.671	.825
VAR00003	32.8222	19.059	.673	.828
VAR00004	32.4889	18.619	.600	.830
VAR00005	32.6000	16.155	.737	.813
VAR00006	32.7333	19.155	.344	.860
VAR00007	32.8222	19.059	.673	.828
VAR00008	32.6000	20.018	.349	.853
VAR00009	32.3778	18.104	.498	.842

Sumber: Hasil data olahan SPSS Versi 20

Menurut Sekaran yang dikutip oleh Dwi Priyatno (2009:26), reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima, dan diatas 0,7 adalah baik. Karena nilai yang diperoleh untuk ketiga variabel, yakni X1, X2 dan Y lebih dari 0,6 maka hasil yang diperoleh reliabel.

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.768	8

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.880	7

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.849	9

Untuk lebih memperoleh gambaran yang jelas tentang distribusi skor variabel transparansi dan akuntabilitas serta pengaruhnya terhadap kinerja Keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil, dapat dilihat dari hasil perhitungan pada persentase jawaban responden dari 45 responden yaitu 60 % atau sebanyak 27 responden total penjumlahan skor penilaian yang diberikannya berada di antara 32 - 43 dari total jawaban tertinggi yaitu skor 5 di kali jumlah item pertanyaan 8 yaitu (5 x 8) sebesar 40 untuk jelasnya terlihat pada tabel serta histogram berikut ini.

Tabel 6. Distribusi Frekuensi Variabel X1

Interval	Frekwensi	Persentase (%)
20 - 23	5	11.11
24 - 27	5	11.11
28 - 31	8	17.78
32 - 35	14	31.11
36 - 39	10	22.22
40 - 43	3	6.67

Interval	Frekwensi	Persentase (%)
	45	100

Begitu juga dari hasil perhitungan pada persentase jawaban responden untuk variabel akuntabilitas dari 45 responden yaitu 60 % atau sebanyak 27 responden total penjumlahan skor penilaian yang diberikannya berada di antara 29 - 37 dari total jawaban tertinggi yaitu skor 5 di kali jumlah item pertanyaan 7 yaitu (5 x 7) sebesar 35.

Tabel 7. Distribusi Frekuensi Variabel X2

Interval	Frekwensi	Persentase (%)
20 - 22	7	15.56
23 - 25	3	6.67
26 - 28	8	17.78
29 - 31	14	31.11
32 - 34	12	26.67
35 - 37	1	2.22
	45	100

Tabel 8. Distribusi Frekuensi Variabel Y

Interval	Frekwensi	Persentase (%)
23 - 26	5	11.11
27 - 30	7	15.56
31 - 34	13	28.89
35 - 38	19	42.22
39 - 42	1	2.22
	45	100

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Pada dasarnya analisis regresi digunakan untuk memperoleh persamaan regresi dengan cara memasukkan perubah satu demi satu, sehingga dapat diketahui pengaruh yang paling kuat hingga yang paling lemah. Untuk menentukan persamaan regresi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 9. Hasil Uji Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	41.272	5.843		7.064	.000
Transparansi	.003	.120	.004	.024	.981
Akuntabilitas	.298	.161	.275	1.855	.071

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Berdasarkan tabel 4.11 di atas diketahui bahwa nilai koefisien dari persamaan regresi dari output didapatkan model persamaan regresi:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

$$Y = 41,272 + 0,003 + 0,298$$

Nilai konstanta sebesar 41,272 memberikan pengertian bahwa jika transparansi anggaran, akuntabilitas instansi pemerintah atas pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang dilakukan secara periodik konstan atau sama dengan nol (0), maka Kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil konstan sebesar 41,272.

Koefisien regresi variabel transparansi (X1) sebesar 0,003 artinya transparansi keuangan mengalami kenaikan 1%, maka Kinerja Pengelola Keuangan pada kantor Pemkab Aceh Singkil (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,003 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

Koefisien regresi variabel Akuntabilitas (X2) sebesar 0,298 artinya Akuntabilitas mengalami kenaikan 1%, maka Kinerja Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,298 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

Uji statistik *t* berguna untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dapat dilihat pada tingkat signifikansi 0,05. Hasil uji statistik *t* dapat dilihat pada tabel 4.12, jika nilai *probability t* < 0,05 maka *H_a* diterima, sedangkan jika nilai *probability t* > 0,05 maka *H_a* ditolak.

T tabel pada signifikansi $0,05/2 = 0,025$, dengan derajat kebebasan $df = n-2$ atau $45 - 2 = 43$, yaitu 2,017. Dari hasil output pada uji *t* tes berdasarkan nilai *t* hitung pada tabel 4.12 di atas dapat diketahui tingkat signifikan untuk masing-masing variabel bebas. Dari kedua variabel bebas tersebut, variabel bebas transparansi diperoleh *t* hitung sebesar 0,024 yakni lebih kecil dari *t* tabel = 2,017. Dengan demikian berarti bahwa secara individual transparansi tidak berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil. Demikian pula diperoleh nilai signifikan sebesar $0,981 > 0,05$ yang berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Kesimpulannya bahwa *H_a* ditolak. Untuk variabel bebas kedua yaitu Akuntabilitas diperoleh nilai *t* hitung = $1,855 < t$ tabel. Hal ini berarti bahwa secara parsial akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil. Demikian juga hasil signifikansi menunjukkan nilai $0,071 > 0,05$ yang berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Kesimpulannya *H_a* diterima.

Uji statistik *F* bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama atau simultan variabel independen terhadap variabel dependen atau terikat. Kriteria yang digunakan adalah apabila probabilitas > 0,05 maka *H_o* diterima sedangkan sebaliknya jika probabilitas < 0,05 maka *H_o* ditolak.

**Tabel 10. Hasil Uji Statistik F
ANOVA^a**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	64.025	2	32.012	1.726	.190 ^b
1 Residual	778.775	42	18.542		
Total	842.800	44			

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

b. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Transparansi

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0.190 atau lebih besar dari nilai probabilitas (*p*-value) 0.05 ($0.190 > 0.05$), ini berarti bahwa variabel independen yaitu transparansi dan akuntabilitas secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dengan mengolah hasil kuesioner dan telah menggunakan beberapa pengujian melalui sofwer SPSS versi 20,0, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari tabel *Coefficients^a* diperoleh persamaan regresi $Y = 41,272 + 0,003X_1 + 0,298X_2$. Konstanta (a) = 41,272 bertanda positif dan transparansi 0,003 bertanda positif serta akuntabilitas 0,298 juga bertanda positif, artinya adalah transparansi dan akuntabilitas mempunyai hubungan yang positif terhadap kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil
2. Secara parsial variabel transparansi dan akuntabilitas berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil
3. Dari tabel *Model Summary^b*, angka R sebesar 0,276 menunjukkan bahwa tingkat korelasi atau hubungan antara variabel transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil adalah hubungan yang kurang atau lemah.
4. Nilai koefisien determinasi (R^2) hasil regresi sebesar 0,076 artinya bahwa variabel transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil sebesar 7,6%. Hasil ini merupakan hasil dari ($R^2 \times 100\%$). Ini berarti transparansi dan akuntabilitas hanya mampu mempengaruhi kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil sebesar 7,6% sedangkan sisanya 92,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Secara simultan transparansi dan akuntabilitas tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara transparansi dan akuntabilitas secara bersama-sama terhadap kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa Nigrum (2010) Akuntabilitas dan Transparansi dalam laporan keuangan Bahrn Assidiqi, 2014, *Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
- Ghozali (2011) Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS semarang Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hadi Syamsul (2006) Metode Penelitian Kuantitatif untuk Akuntansi keuangan (jilid 1). Yogyakarta Ekonesia
- Hasibuan, Melayu, S. P., 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Penerbit : Bumi Aksara, Jakarta
- Hasibuan, E. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Ditinjau Dari Rasio Solvabilitas Dan Profitabilitas Pada PT Mulia Utama Medan. Jurnal Ilman: Jurnal Ilmu Manajemen, 12(1), 48-56.
- Irna Setiyaningrum (2015) skripsi *Pengaruh Akuntabilitas Transparansi dan Pengawasan terhadap kinerja Anggaran dengan konsep value for money pada badan usaha milik daerah (BUMD) di Yogyakarta*. Universitas UIN Maulana Malik ibrahim Malang
- Jumingan. (2006). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kepmendagri No 29 Tahun 2002, Tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksana Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan, Direktorat Pengelolaan Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kepmendagri, 2008, UndangUndang Pemerintahan
- Lubis, P. S., Zulaili, Z., & Wardani, W. (2022). Pengaruh Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Terhadap Metode Rasio Pada Pt. Btn Cabang Medan. Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA), 2(1), 10-17.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Mangkunegara, Anwar Prabu, 2005, *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*, edisi pertama, cetakan pertama, Penerbit : Refika Aditama, Bandung
- Mardiasmo (2002) Akuntansi sektor publik Yogyakarta

- Mardiasmo (2002) Otonomi dan manajemen keuangan daerah Yogyakarta: Andi offset
- Mardiasmo, 2004, *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset
- Mardiasmo, 2016, *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi pertama, Yogyakarta: Andi Offset
- Nico Andrianto., 2007. *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Noor Cholis Madjid dan Hasan Ashari., 2013. *Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (studi Kasus Pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan)*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan pendidikan dan Pelatihan keuangan.
- Nurlan Darise, 2008, *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*, Jakarta: PT Indeks
- Oktana Yudha sakti (2017) skripsi *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap pengawasan pengelolaan keuangan daerah di pemerintahan Kabupaten Trenggalek* Universitas Negeri Yogyakarta
- PP No. 15 Tahun 2000, Tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah
- Rivai, Veithzal dan Basri, 2005. *Performance Appraisal, Sistem Yang Tepat Untuk Menilai Kinerja Pegawai Dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*. Rajagrafindo Persada. Jakarta
- Siti Rahmadani (2020) skripsi *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di desa Helvetia kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli serdang*
- Suriana, Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelola Anggaran Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Implementasi Ekonomi dan Bisnis FE-Univa Medan*
- Sugiono (2017) metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D Bandung Alfabet, CV
- Sunyoto Dadang (2013) Metode penelitian Akuntansi. Bandung: PT Refika Aditama
- UU. No. 32 dan No. 33 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan
- Wibowo, 2007. *Manajemen Kinerja*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta
<https://infopublik.id/Senin,17/04/2023>